

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penulisan sejarah Indonesia, gerakan-gerakan sosial cenderung ditulis sebagai fenomena yang tidak penting dengan alasan bahwa sejarawan konvensional lebih memperhatikan apa yang disebut dengan peristiwa-peristiwa besar. Gerakan sosial bisa dianggap bersifat lokal, berukuran kecil, pra politis, tidak artikulat, dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa besar. (Sartono Kartodirdjo, 1984:17). Namun sebenarnya gerakan-gerakan sosial dapat dijadikan sebagai peta kekuatan sosial dalam sejarah Indonesia. Gerakan-gerakan sosial dapat dikategorikan ke dalam penelitian sejarah sosial karena menyangkut sejarah perjuangan dari berbagai golongan sosial masyarakat akibat adanya eksploitasi.

Dominasi bangsa Barat semakin mempercepat perubahan-perubahan sosial di masyarakat Jawa. Pada awal abad ke-19 bangsa Barat dalam hal ini Belanda semakin mendominasi di bidang perekonomian. Politik *Cultuurstelsel* (tanam paksa) tahun 1830, mengakibatkan para petani diwajibkan menanam tanaman wajib seperti kopi, tebu, nila, teh, tembakau, kapas. Setelah tahun 1870 berkembanglah usaha-usaha besar dalam bentuk Perseroan Terbatas yang meliputi lebih dari satu perusahaan (Burger, 1970:206). Banyaknya daerah perkebunan dan pertanian di Jawa

membutuhkan banyak pekerja baik buruh pabrik maupun buruh tani. Pendirian pabrik-pabrik gula di beberapa daerah dimaksudkan untuk mengolah hasil dari perkebunan tebu tersebut. Kesenjangan sosial antara pemilik modal dan para pekerja (buruh) dan petani menyebabkan sering terjadinya pergolakan-pergolakan antara majikan dan buruh.

Gerakan sosial yang terjadi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19. Timbulnya pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan, kegaduhan, brandal dan sebagainya cukup menggoncangkan masyarakat dan pemerintah pada waktu itu. Seperti gerakan Makuwijoyo tahun 1865 di desa Merbung, Klaten, gerombolan *kecu* yang menyerang para *bekel* dan penyewa tanah tahun 1867-1875 *perkecu-an* terjadi di daerah Klaten, Boyolali, Sragen dan sekitarnya. (Suhartono,1991:142-144).

Gerakan protes buruh tani yang bersifat lokal sesungguhnya terjadi pada tahun 1882 di Yogyakarta yaitu adanya pemogokan buruh tani di lingkungan pabrik dan perkebunan tebu di tiga kabupaten yaitu Sleman, Kalasan dan Bantul (Djoko Utomo, 1983: 67). Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 merupakan suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh para petani yang didukung oleh kalangan agamawan sebagai pimpinan pemberontakan. Peristiwa tersebut banyak terjadi di daerah pedesaan. Hampir setiap tahun di salah satu daerah terjadi pergolakan dan kerusuhan yang sering diwujudkan sebagai tindakan-tindakan yang bersifat agresif dan radikal. Gerakan itu ternyata merupakan suatu kekuatan sosial yang besar untuk daerah pedesaan. (Sartono Kartodirdjo, 1975: 239).

Gerakan sosial yang didukung oleh para petani bertujuan untuk mewujudkan atau menolak suatu perubahan dari susunan masyarakat. Dalam usahanya untuk melaksanakan tujuannya sering kali ditempuh jalan yang radikal dan revolusioner.

Diberlakukannya sistem ekonomi-uang telah memungkinkan bagi pelaksanaan sistem pajak, perdagangan hasil bumi, buruh upahan, dan masalah kepemilikan dan penggarapan tanah. Dalam bidang politik timbul banyak ketegangan dan ketidak-stabilan sebagai akibat meluasnya penetrasi sistem administrasi yang bersifat legal rasional yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Sementara lembaga-lembaga tradisional semakin terdesak, penguasa-penguasa tradisional melorot kedudukannya yang ditempatkan di bawah pengawasan kekuasaan kolonial. (Sartono Kartodirdjo, 1977: 240).

Memasuki abad ke-20 “Perserikatan Komunis Hindia”, yang dipimpin oleh Semaun dan Tan Malaka serta pendirian Perserikatan Pegawai *Spoor* dan Kereta Api (*Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel*), mengadakan pemogokan pada tahun 1923. Pemberontakan di Jawa tahun 1926, dan di Sumatra pada tahun 1927 adalah bentuk aksi akibat kezaliman imperialisme yang menindas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memang belum merata berpaham komunis. Akan tetapi paham kebangsaan dapat menggerakkan rakyat menentang penindasan. Rusia (Moskow) telah mempengaruhi rakyat Indonesia dengan revolusi dunianya. Karena masa-masa itu di Rusia sedang terjadi

perubahan besar (revolusi) komunis, keadaan itu bergema sampai ke Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan di daerah-daerah.

Setelah Indonesia merdeka gerakan protes para buruh dan petani masih sering terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah daerah Delanggu yang notabene adalah tanah *Vorstenlanden* atau tanah kantong milik raja dari Surakarta. Yang khas dari daerah ini ialah memberi peluang tumbuh suburnya perkebunan-perkebunan asing, karena di samping terjamin status hak tanahnya, juga jumlah tenaga kerja yang diperlukan memperoleh jaminan yang memadai. Oleh karena itu, di daerah Delanggu dapat berkembang perkebunan-perkebunan asing secara subur dan mandiri.

Hak-hak orang-orang Eropa dalam mengelola tanah itu masih berjalan yang disebut dengan hak *konversi* yaitu hak yang timbul atas kekuatan keputusan Raja. Para pengusaha yang masih menguasai tanah berdasarkan aturan *Landhuur* (sewa tanah) diberi kesempatan untuk mendapat tanah menurut peraturan *VGR (Vorstenlandsch Grondhuur Reglement)* dengan cara:

- a. melepaskan segala haknya atas tanah yang bersangkutan.
- b. dengan "*beschikking*" (keputusan) Raja diberikan jaminan bahwa pengusaha akan memperoleh tanah yang diperlukan untuk perusahaannya dengan hak istimewa selama jangka waktu 50 tahun. (Boedi Harsono, 2008:93).

Pergolakan sering terjadi di daerah ini antara tahun 1945-1950 yang melibatkan para petani perkebunan, pengaruh paham komunis yang memperjuangkan kesamaan kelas membuat para kaum buruh dan petani tertarik masuk ke dalam organisasi buruh Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan Sarekat Tani Islam Indonesia (STII). Organisasi itulah yang membuat para buruh dan petani berani melakukan protes kepada pemilik modal apabila ketidak-adilan menimpa para buruh dan petani. (Suyatno, 1984: 67).

Perbedaan aliran politik dari kelompok-kelompok sosial di Surakarta mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas revolusi sosial. Peristiwa Delanggu yang terjadi pada bulan Mei 1948 dimulai oleh pemogokan buruh-buruh perkebunan kapas daerah Delanggu merupakan contoh aspek intensitas politik dalam revolusi sosial. (Suyatno, 1984:67).

Hal yang menarik untuk diteliti dari gerakan buruh dan petani adalah faktor-faktor apa yang mendorong mereka melakukan gerakan ini dan bagaimana proses terjadinya gerakan protes buruh dan petani di pabrik karung Delanggu pada tahun 1948.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, maka ditemukan suatu permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong kaum buruh dan petani melakukan gerakan protes mogok kerja pada pabrik karung Delanggu tahun 1948?

2. Bagaimana proses terjadinya gerakan buruh dan petani pabrik karung Delanggu tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan buruh dan petani pabrik karung tahun 1948 di Delanggu.
2. Menjelaskan tentang proses terjadinya gerakan buruh dan petani di pabrik karung Delanggu tahun 1948.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1. Memberi pemahaman tentang gerakan buruh yang terjadi di daerah Delanggu, Klaten sebagai model sejarah sosial di tingkat lokal kepada masyarakat.
 - 1.2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - 2.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu sejarah khususnya pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) terutama mengenai gerakan buruh tani yang terjadi di daerah Delanggu, Klaten.
 - 2.2. Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang sejarah sosial.